

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN PELACURAN DI PEMUKIMAN YANG BERBAUR DENGAN TEMPAT PELACURAN

Nina KARININA dan Teti Ati PADMI

Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

ABSTRAK

Ada berbagai pendapat masyarakat tentang keberadaan pelacuran eks-lokalisasi pelacuran "Pantai Harapan" dan "Pemandangan" di kecamatan Panjang Kotamadya Bandar Lampung. Walaupun lokalisasi tersebut telah ditutup melalui SK Gubernur Lampung pada tahun 1995, namun pelacuran di tempat tersebut masih tetap berlanjut.

Hasil penelitian di dua lokasi pelacuran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja sebagai generasi muda yang bermukim di daerah tersebut tidak setuju dengan keberadaan kegiatan pelacuran. Sebagian kecil remaja mengatakan tidak ada masalah. Demikian juga sebagian besar generasi tua terutama para orang tua mereka mengatakan bahwa keberadaan pelacuran tidak ada pengaruhnya terhadap anak-anak mereka.

Menurut tokoh masyarakat setempat, dengan ditutupnya kedua lokalisasi, bursa pelacuran tetap berlanjut baik di tempat semula maupun berpindah tempat operasi di jalan dan diskotik. Disimpulkan bahwa keberadaan pelacuran perlu pengawasan pemerintah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah pelacuran di Indonesia pada saat ini merupakan isu yang sering mendapat sorotan tajam khususnya di media massa. Praktek pelacuran dapat membawa dampak yang merugikan orang banyak antara lain penularan penyakit seksual termasuk HIV/AIDS dan tumbuhnya tindak kekerasan. Tetapi di lain pihak ada kelompok orang yang diuntungkan oleh adanya tindak pelacuran tersebut. Phenomena yang saat ini terjadi secara luas dalam kaitan pelacuran dan sedang menjadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri adalah adanya bisnis perdagangan perempuan. Seperti disebutkan oleh CAWT (*coalition Against Women Trafficking*) dalam

laporannya *Trafficking in Women and Prostitution in Asia Pacific 1998* bahwa tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi. Meskipun dalam perekrutannya sering kali disamarkan lewat iming-iming pekerjaan (pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke dan salon). Ratusan tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI) yang terjun dalam prostitusi di Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Australia, Korea Selatan dan Jepang (Anonim, 2001). Pada tahun 2000 menurut catatan Kepolisian RI, telah terungkap 1,400 kasus pengiriman perempuan secara illegal dari Indonesia ke luar negeri (Harian Kompas, 9 Oktober 2001: Hal.10).

Di lain pihak dengan ditutupnya lokalisasi pelacuran, berbagai isu yang

muncul di masyarakat seperti: para penyandang WTS kehilangan nafkah padahal mereka adalah tulang punggung keluarga; para WTS beroperasi di tempat-tempat umum seperti di pinggir-pinggir jalan, diskotik dan permukiman penduduk secara terselubung; masyarakat pedagang di sekitar lokasi tersebut kehilangan omset penjualan karena kehilangan pembeli.

Faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong terjadinya pelacuran. Ada berbagai faktor lain yang perlu diketahui yaitu keluarga yang tidak berfungsi, kurang oendidikan, meningkatnya pola konsumsi, migrasi dari desa ke kota, perilaku seksual pria, dan pola budaya tertentu di suatu masyarakat.

Keberadaan pelacuran mempunyai dampak social yang cukup luas dalam kehidupan manusia seperti timbulnya penularan penyakit, pemerasan, tindak kekerasan terhadap perempuan, gangguan ketertiban dan keamanan. Kegiatan pelacuran bila sudah muncul di suatu tempat sulit dihilangkan.

Bagi sekelompok orang yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, maka bisnis pelacuran merupakan bisnis yang cerah. Kegiatan pelacuran dalam suatu krisis ekonomi telah mendorong meluasnya bisnis atau sindikat perdagangan anak perempuan.

Upaya-upaya pencegahan serta pelayanan dan rehabilitasi para penyandang masalah WTS pun dihadapkan pada masalah-masalah yang rumit. Namun demikian keberadaan kegiatan pelacuran pada masyarakat Indonesia tidak dapat ditolerir karena bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat yang sudah terlembagakan yang didasari oleh norma-norma agama.

Masalah pelacuran di Indonesia saat ini sedang menjadi tantangan karena kejadiannya makin meningkat dengan cara-cara yang lebih canggih. Berbagai kejadian yang terkait dengan masalah dunia pelacuran sering muncul di media massa baik elektronik maupun surat kabar. Masalah pelacuran dapat berkait dengan tindak pidana seperti adanya perdagangan perempuan, baik usia anak maupun dewasa, serta penipuan dengan dalih mencari pekerjaan yang iming-iming dengan gaji yang besar.

Dalam upaya mengatasi permasalahan pelacuran diperlukan kerjasama semua pihak. Upaya penanganan masalah pelacuran telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah walaupun keberhasilannya belum dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Banyak protes dari berbagai kelompok masyarakat atas kehadiran tempat pelacuran yang dinyatakan dengan aksi-aksi unjuk rasa atau pembubaran Beberapa tempat pelacuran. Sementara itu juga kalangan pemerintah daerah di Beberapa daerah giat melaksanakan penertiban berbagai tempat pelacuran yang mulai marak dan dianggap meresahkan.

Sebagai reaksi dari berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa terganggu oleh adanya bisnis pelacuran, berbagai lokasi pelacuran baik yang illegal maupun yang sebelumnya secara resmi telah mendapat izin dari pemerintah daerah, dilarang beroperasi lagi oleh pemerintah yang ditetapkan setempat melalui surat keputusan.

Namun demikian ditutupnya lokalisasi pelacuran pada kenyataannya di lapangan menimbulkan berbagai permasalahan baru, antara lain para pen-

yangandang WTS mengklaim kehilangan nafkah, kegiatan pelacuran menyebar ke berbagai tempat dan terselubung, bahkan tindak pelacuran masih tetap berlangsung tanpa pengawasan dari pemerintah.

Banyak pendapat di berbagai kalangan pemerintah maupun berbagai pihak yang terkait dengan upaya pengendalian penyakit menular seksual, bahwa ditutupnya lokalisasi akan sulit untuk mengontrol penyebaran penyakit menular seksual termasuk HIV. Namun demikian belum diketahui bagaimana pendapat para Tokoh Masyarakat tentang keberadaan pelacuran dan tindakan penutupan lokalisasi pelacuran.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat masyarakat di pemukiman yang berbaur dengan tempat pelacuran mengenai keberadaan pelacuran serta penutupan lokalisasi pelacuran?

1.3 Tujuan Penelitian

Teridentifikasinya pendapat masyarakat tentang keberadaan pelacuran di pemukiman mereka, serta dampak penutupan lokalisasi pelacuran tersebut oleh pemerintah.

Untuk mengetahui pendapat tentang keberadaan pelacuran dan penutupan lokalisasi pelacuran, maka ruang lingkup penelitian meliputi aspek-aspek: pendapat remaja sebagai generasi muda dan orang tua remaja sebagai generasi tua tentang keberadaan pelacuran di pemukiman mereka, pendapat tokoh masyarakat tentang penutupan lokasi maupun lokalisasi pelacuran.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Responden terdiri dari dari generasi generasi muda yaitu anak-anak remaja dalam batas usia antara 12 sampai 20 tahun, dan generasi tua dalam arti para orang tua dan para Tokoh masyarakat. Jumlah responden kategori anak berjumlah 30 orang atau 13% dari jumlah anak remaja (usia 10~ 20 tahun) yang berada di pemukiman tersebut. Responden kategori orang tua berjumlah 10 orang, dan responden Tokoh Masyarakat berjumlah 6 orang. Responden anak ditentukan secara random, sedangkan responden orang tua dipilih secara purposif.

1.5 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juli tahun 2001 dengan lokasi penelitian di dua pemukiman eks lokalisasi pelacuran "Pemandangan" di Kampung Sawah Kelurahan Way Lunik dan eks lokalisasi "Pantai Harapan" di Kampung Rawa Laut Kelurahan Panjang Sealatan. Kedua lokasi penelitian tersebut secara administratif termasuk Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

2. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kedua lokasi penelitian secara administrasi berada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, yaitu di Kampung Sawah Kelurahan Way

Lunik, dan Kampung Rawa Laut di Kelurahan Panjang Selatan.

2.1 Kelurahan Way Lunik

Penduduk

Berdasarkan data Monografi Kelurahan Tahun 2001 yang dihimpun di Kantor Kelurahan Way Lunik, keadaan penduduk di daerah ini dapat digambarkan sebagai berikut: Jumlah seluruh penduduk adalah 6,839 orang yang terdiri dari 125 unit rumah tangga (KK). Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan berjumlah 3,427 orang dan laki-laki 3,412 orang. Dengan demikian jumlah laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Di kelurahan ini ada juga tercatat penduduk berkewarganegaraan asing yang semuanya berjumlah 14 orang.

Ditinjau dari segi agama, mayoritas (94.12%) beragama Islam, sedangkan sebagian kecil (5.88%) beragama lainnya yaitu Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Secara terperinci persentase masing-masing agama dapat dikemukakan sebagai berikut : Islam 6,437 orang (94.12%), Kristen 100 orang (1.46 %), Katolik 100 orang (1.46%), Hindu 31 orang (0.45%), Budha 135 orang (1.97%), sedangkan lainnya sebanyak 2.11 % belum diketahui.

Penggolongan penduduk berdasarkan pekerjaan tidak diperoleh data yang akurat tentang jumlahnya di berbagai sektor pekerjaan. Namun demikian menurut jenisnya dapat digolongkan pada empat macam yaitu pensiunan, nelayan, pemulung dan jasa.

Penyandang Masalah Sosial

Penyandang masalah sosial di Kelurahan Way Lunik yang tercatat di Kantor Kelurahan adalah: penyandang

masalah WTS 1,164 orang, penyandang tuna daksa 2 orang, penyandang tuna grahita 2 orang, dan penyandang tuna rungu 12 orang

Dilihat dari segi jumlah masing-masing penyandang masalah tersebut di atas dengan demikian yang paling banyak adalah penyandang WTS yaitu mencapai 17% dari seluruh jumlah penduduk. Di daerah kelurahan ini terdapat lokasi pelacuran yang sebelumnya adalah merupakan lokalisasi pelacuran "Pemandangan." Lokalisasi pelacuran tersebut secara resmi telah ditutup dengan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1995. Namun demikian kegiatan pelacuran masih terus berlanjut. Tempat pelacuran tersebut membaaur dengan pemukiman penduduk, dan bersebelahan dengan kawasan industri semen Baturaja. Penghuni pemukiman ini didasarkan pada segi etnis adalah heterogen.

Pada umumnya adalah migran dari luar Lampung yang sudah lama bermukim di tempat tersebut. Di pemukiman tersebut terdapat sejumlah anak-anak dengan penggolongan usia sebagai berikut.

Tabel 1 Penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Way Lunik, 2001

Kelompok Usia	Jumlah	Persen
0 - 5	34	19.65
6 - 9	26	15.03
10 - 13	46	26.59
14 - 17	42	24.28
18 - 20	25	14.45
Jumlah	173	100.00

Sumber: Hasil pendataan petugas RT/RW kampung Pemandangan, Kelurahan Way Lunik, Januari Tahun 2001.

Kondisi pemukiman di lokasi pelacuran tersebut tergolong umuh dan padat penduduk. Fasilitas sosial yang ada adalah mesjid 1 buah, Balai pertemuan 1 buah yang sebelumnya

adalah tempat penyelenggaraan rehabilitasi social para penyandang WTS. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2001, penyandang WTS di pemukiman ini berjumlah 149 orang dengan jumlah mucikari sebanyak 57 orang. Dengan demikian dibandingkan dengan jumlah WTS rata-rata 1 orang mucikari menampung 3 orang WTS.

Usia para penyandang WTS sebagian besar (95.31%) antara 21 sampai 35 tahun, sedangkan yang lainnya berusia di bawah 21 tahun ada 7 orang atau 4.69%.

Infra Struktur Sosial

Ditinjau dari segi potensi kesejahteraan sosial yang ada di Kelurahan Way Lunik terdapat beberapa infra struktur sosial yang perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan di daerah setempat. adalah sebagai berikut: organisasi Karang Taruan dengan jumlah anggota tercatat sebanyak 115 orang; Kelompok PKK dengan jumlah anggota sebanyak 37 orang; LMD dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang; Majelis Taklim sebanyak 8 kelompok dengan anggota 320 orang; Remaja Masjid sebanyak 5 kelompok dengan anggota 600 orang.

Kondisi Perumahan

Jumlah bangunan di Kelurahan Way Lunik menurut data kantor Kelurahan meliputi 1,272 buah. Apabila dilihat dari segi bahan bangunan dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu rumah tembok, rumah setengah tembok, dan rumah yang dibuat dari bahan kayu. Khusus perumahan di pemukiman eks-lokalisasi tuna susila "Pemandangan," ditinjau dari segi kondisinya pada umumnya merupakan rumah semi permanen dan non perma-

nen, serta keadaan lingkungan sekitarnya dalam keadaan kumuh. Rumah-rumah berdempetan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak mempunyai halaman. Namun demikian dapat ditemui lorong-lorong sempit sebagai jalan bagi warga.

2.2 Kelurahan Panjang Selatan

Penduduk

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2000 yang dihimpun oleh kantor kelurahan Panjang Selatan, penduduk di wilayah ini berjumlah 20,400 orang terdiri dari 9,767 orang laki-laki dan 10,633 orang perempuan. Secara terperinci jumlah penduduk tersebut berdasarkan usia adalah sebagai berikut (Anonim, 2001f).

Tabel 2 Penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Panjang Selatan, 2001

Usia	Jumlah	Persen
0 - 3	2,582	12.68
4 - 6	1,267	6.21
7 - 12	2,125	10.41
13 - 15	1,885	9.24
16 - 18	3,001	14.71
19 ke atas	9,540	46.76
Jumlah	20,400	100.00

Ditinjau dari segi agama mayoritas (86.41%) beragama Islam sedangkan sebagian kecil (13.59%) beragama lainnya yaitu Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Secara terperinci jumlah pemeluk masing-masing agama dapat dikemukakan sebagai berikut: Islam berjumlah 17,628 Orang (86.41%), Kristen berjumlah 1,633 orang (8%), Katholik berjumlah 745 orang (3.65%), Hindu berjumlah 34 orang (0.17%) dan Budha berjumlah 360 orang (1.77%) (Anonim, 2001f).

Penggolongan penduduk di Kelurahan Panjang Selatan berdasarkan mata pencaharian meliputi Pegawai

Negeri Sipil berjumlah 953 orang, ABRI berjumlah Swasta 2,249 orang, Wiraswasta/Pedagang berjumlah 2,249 orang, Tani berjumlah 1,091 orang, pertukangan berjumlah 495 orang, Buruh tani berjumlah 107 orang, Pensiunan 167 orang, Nelayan berjumlah 236 orang, Pemulung 8 orang dan di bidang jasa ada 109 orang.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tercatat di Kelurahan Panjang Selatan adalah: penyandang tuna netra 3 orang; penyandang tuna rungu 2 orang; penyandang tuna grahita 1 orang; penyandang tuna daksa 1 orang; pemulung 3 orang.

Di samping itu tercatat pula keluarga miskin berjumlah 2,502 KK dengan kategori miskin berjumlah 303 KK dan miskin sekali 2,199 KK.

Berdasarkan data Monografi Kelurahan Tahun 2000 tersebut tidak tercantum penyandang tuna susila di wilayah Kelurahan. Namun demikian di Kelurahan ini terdapat suatu permukiman yang ternyata tempat tindak tuna susila yaitu di eks lokalisasi pelacuran "Pantai Harapan" yang secara resmi lokalisasi tersebut ditutup berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No 6/035/ B III/HK/1995 Tanggal 27 Januari 1995. Sebagaimana halnya eks lokalisasi "Pemandangan," kegiatan pelacuran di tempat ini pada kenyataannya masih tetap berlanjut.

Tempat pelacuran berbaur dengan permukiman penduduk di mana terdapat anak-anak yang sudah biasa menyatu dengan kondisi kehidupan setempat. Jumlah dan penggolongan usia anak-anak yang hidup di lokasi pelacuran ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah anak di lokalisasi

Kelompok Usia	Jumlah	Persen
2 - 5	2	1,42
6 - 9	25	17,73
10 - 13	44	31,21
14 - 17	48	34,04
18 - 20	22	15,60
JUMLAH	141	100,00

Sumber: Lampung, Januari 2002, Dinas Kesejahteraan Sosial, provinsi Lampung.

Jumlah penyandang masalah WTS di tempat ini seluruhnya yang terdaftar ada 148 orang dengan jumlah mucikari 55 orang. Menurut data yang dihimpun oleh staf Dinas Kesejahteraan Sosial provinsi Lampung dapat diketahui bahwa seorang mucikari menampung antara 1 sampai 8 orang penyandang WTS. Namun bila mana dihitung secara rata-rata, seorang mucikari menampung 3 orang penyandang WTS. Usia WTS berkisar antara 19 sampai dengan 48 tahun. Hanya sebagian kecil atau 1.35% dari seluruh WTS yang berpraktek pelacuran berusia 19 sampai dengan 48 tahun. Hanya sebagian kecil atau 1.35% dari seluruh WTS yang berpraktek pelacuran berusia 19 sampai 20 tahun, sebagian besar atau 98.65% berusia antara 21 sampai dengan 48 tahun.

Infra Struktur Sosial

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Monografi Desa bersangkutan, daerah ini terdapat juga beberapa infra struktur sosial yang dianggap penting untuk dimanfaatkan dalam upaya pembangunan kesejahteraan social di daerah setempat. Di antaranya adalah organisasi social Karang Taruna, PKK dengan jumlah anggota 76, dan pengurus LMD sebanyak 15 orang.

Kondisi Perumahan

Jumlah bangunan di Kelurahan Panjang Selatan menurut data kantor kelurahan meliputi 2,749 buah yang

terdiri dari rumah permanen 146 buah, semi permanen 1,246 buah dan rumah non permanen 1,357 buah. Khususnya di permukiman permukiman eks lokalisasi "Pantai Harapan" di lihat dari kondisi pada umumnya semi permanen dan non permanen, keadaan lingkungannya kumuh, pemukiman berbatasan langsung dengan laut, dimana air laut pasang setinggi-tingginya permukiman tersebut terendam air.

3. PENDAPAT TENTANG KEBERADAAN PELACURAN

Keberadaan dan penanganan tentang masalah pelacuran sejak dahulu sampai sekarang merupakan suatu masalah yang selalu bersifat kontroversi. Di satu pihak ada oknum yang mendukung kelangsungan pelacuran, dan sebaliknya masyarakat pada umumnya tidak menghendakinya. Pendapat tentang keberadaan pelacuran pada responden kalangan remaja, orang tua dan Tokoh Masyarakat di sekitar lokasi pelacuran dapat dikemukakan sebagai berikut.

3.1 Pendapat Generasi Muda

Dari jawaban-jawaban responden generasi muda dapat diketahui bahwa sebagian besar generasi muda yang bermukim di sekitar lokasi pelacuran mempunyai sikap-sikap tidak simpatik terhadap keberadaan pelacuran di daerah setempat. Sebagian kecil dari mereka bersikap netral, tidak berpendapat dengan mengatakan tidak tahu, dan bersikap moderat dalam arti setuju saja ada pelacuran asalkan diberi pengawasan.

Dari 30 orang responden anak secara terperinci apa yang mereka kemukakan atas pertanyaan tentang bagaimana sikap mereka terhadap ke-

beradaan pelacuran adalah sebagai berikut: sebagian besar atau 63% mengatakan tidak setuju, sebagian kecil atau 17% mengatakan mengganggu ketenangan belajar. Sedangkan sebagian kecil lainnya yaitu 10% mengatakan tidak ada masalah, 3% mengatakan asalkan diberi pengawasan, dan yang 7% mengatakan tidak tahu.

Mengenai pendapat mereka tentang keluarga-keluarga yang menyediakan tempat pelacuran, sebagian besar dari responden remaja mempunyai berbagai pendapat yaitu dengan mengatakan: mengganggu orang belajar 60%, tempat pelacuran harus dihapus 7%, perlu diberi nasihat karena perbuatan itu tidak baik 7%, dibiarkan saja yang penting tidak mengganggu 3%, dan sebanyak 23% mengatakan tidak tahu.

Ada berbagai pendapat di kalangan remaja yang dibesarkan di permukiman tersebut tentang cara menangani pelacuran. Dari 30 orang responden remaja terdapat berbagai pendapat sebagai berikut: Diadakan bimbingan dan pengarahan tentang buruk baiknya pelacuran dikemukakan oleh 50% responden, dikenakan sanksi 24%, tempat pelacuran ditutup 3%, dan yang 23% tidak mempunyai pendapat.

Mengenai pendapat mereka tentang cara Tokoh Masyarakat menangani pelacuran, dari jawaban bebas yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: memberi nasehat agar tidak melacur 33%, mengusir pelaku pelacuran 7%, memberi penyuluhan rohani/ agama 10%.

3.2 Pendapat Generasi Tua

Responden yang mewakili generasi tua yang bermukim di permukiman penduduk yang berbaur dengan tempat pelacuran di Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung yang men-

gatakan keberadaan tempat pelacuran di pemukiman tersebut sudah lama yaitu 30 tahun yang lalu. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun 1994 sejak mereka bermukim di sana. Sepengetahuan mereka, mulainya tempat pelacuran bervariasi. Yang paling banyak adalah yang mengatakan sejak tahun 1970 dikemukakan oleh 30 % responden yang mengatakan sejak tahun 1991: 20%, sejak tahun 1981: 10%, sejak tahun 1982: 10%, sejak tahun 1988: 10%, dan tahun 1997: 10 %.

Pendapat generasi tua tentang pengaruh pelacuran tindak tuna susila terhadap perkembangannya, sebagian besar responden atau 80% mengatakan tidak ada pengaruh. Sebagian kecil mengatakan bahwa pelacuran berpengaruh sedikit terhadap anak-anak yaitu anak-anak mengetahui tentang kegiatan pelacuran 10%, dan ada 10% dari responden yang mengatakan sangat berpengaruh.

Arahan-arahan orang tua terhadap anak-anak agar mereka memahami akibat buruk dari perilaku pergaulan bebas yang cenderung ke arah bertindak tuna susila menurut para orang tua adalah sebagai berikut: Sering memberikan nasehat agar tidak terpengaruh pergaulan bebas dikemukakan oleh 80% dari responden, bila malam hari tiba anak-anak tetap berada di rumah dikemukakan oleh 10% responden, dan ada 10% yang mengatakan bahwa anak-anak sudah tahu sendiri membawa dirinya.

3.3 Pendapat Tokoh Masyarakat

Beberapa hal yang diketahui oleh Tokoh Masyarakat dengan adanya penutupan lokalisasi dan tempat rehabilitasi tersebut adalah sebagai berikut: Menurut tokoh masyarakat di Kelurahan Way Lunik dan Panjang Selatan, eks-lokalisasi pelacuran yang

sebelumnya bernama "Pantai Harapan" dan "Pemandangan" telah ditutup oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1995 dengan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Lampung dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat. Juga dikemukakan bahwa dengan ditutupnya lokalisasi dikarenakan adanya penularan HIV/AIDS, akibat penutupan lokalisasi menurut para Tokoh Masyarakat banyak WTS berkeliaran di tempat-tempat lain, dan ada yang mengemukakan bahwa para WTS yang ingin berhenti menjalani dunia pelacuran sulit mencari pekerjaan sehingga menjadi WTS lagi.

Ditinjau dari segi pendapat tokoh masyarakat tentang pembubaran lokalisasi tersebut, dari hasil wawancara dapat diketahui variasi jawaban sebagai berikut: mengatakan setuju lokalisasi pelacuran dibubarkan. Yang lainnya mengatakan bahwa adanya pembubaran lokalisasi berkeliaran di jalan-jalan, pelacuran tidak akan hilang tetapi pindah lokasi, daerah bekas lokalisasi WTS keadaannya tetap berlanjut karena kegiatan pelacuran tanpa adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah, penyandang tuna susila jangan dibiarkan beroperasi di jalan-jalan tetapi harus ada tempatnya, dan ada juga yang mengatakan ada baiknya lokalisasi rehabilitasi pelacuran dibubarkan karena pelacuran tidak baik terhadap perkembangan dan moral anak.

Dalam kaitan penanganan masalah pelacuran, para Tokoh Masyarakat mengemukakan berbagai pendapat antara lain: tempat pelacuran dilokalisasi di suatu tempat terpencil, agar Dinas Sosial membina lagi pelaku tindak tuna susila sehingga mereka tidak beroperasi di jalan-jalan dan tempat hiburan, agar para WTS

dipulangkan kekampungnya, dan agar disediakan sarana untuk mendapatkan pekerjaan.

4. KESIMPULAN

Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa dikalangan generasi muda sebagian besar tidak setuju tentang adanya pelacuran di pemukiman mereka. Sebagian kecil memiliki sikap toleransi dengan mengatakan tidak ada masalah asalkan diberi pengawasan. Demikian juga pendapat mereka terhadap keluarga-keluarga yang menyediakan fasilitas pelacuran di rumah tinggal sebagian besar generasi muda tidak setuju. Hanya Beberapa orang saja yang mengatakan biar saja keluarga-keluarga tertentu menyediakan tempat pelacuran di rumah tinggal asalkan tidak mengganggu.

Pendapat generasi muda tentang cara menangani pelacuran antara lain: dengan pengarahannya tentang baik buruknya pelacuran, diberi sanksi, diberi keterampilan dan modal, disalurkan ke tempat kerja, dan pelacuran harus ditutup.

Generasi tua pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pelacuran di pemukiman tidak berpengaruh terhadap anak-anak di sekitarnya, hanya sedikit saja yang mengatakan bahwa pelacuran sangat mempengaruhi anak-anak Para orang tua yang mengatakan

tidak berpengaruh, bahwa anak-anak mereka bila malam harus berada di rumah, tidak boleh keluyuran pada malam hari.

Tokoh masyarakat mengatakan bahwa dengan ditutupnya lokalisasi, kegiatan pelacuran tetap berlanjut, dan tidak akan hilang, tetapi berpindah tempat, oleh karena itu kegiatan pelacuran harus dikendalikan.

DAFTAR BACAAN

- Anonim 2000. "Lingkungan Sistem Perdagangan Perempuan" *Harian Kompas*, Senin 22 Oktober, Jakarta.
- Anonim 2001. "Indonesia Peringkat Terburuk Perdagangan Perempuan," *Harian Kompas*, Selasa 9 Oktober 2001, Jakarta.
- Monografi Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Tahun 2001.
- Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung, 2001. *Hasil Pendataan Penyandang WTS Eks Lokalisasi WTS "Pemandangan" Tahun 2001, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.*
- Monografi Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Tahun 2001.
- Daftar Nama-Nama Keluarga Miskin dan Miskin Sekali, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Tahun 2000.
- Dinas kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung. *Data Anak di Eks-Lokalisasi Tuna Susila "Pantai Harapan" Kampung Rawa laut, Kecamatan Panjang Selatan, Kota Bandar Lampung, Januari 2002.*
- Dinas kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, *Hasil Pendataan WTS di Eks-Lokalisasi WTS "Pantai Harapan" Tahun 2001.*